



# STUDI KESENJANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

## STUDY OF THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX GAP IN LAMPUNG UTARA DISTRICT

Sasmika Dwi Suryanto<sup>a\*</sup>, Maulana Mukhlis<sup>a</sup>, Syarief Makhya<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung

\*Korespondensi: sasmikads@gmail.com

### Info Artikel:

- Artikel Masuk: 23 Oktober 2022
- Artikel diterima: 25 September 2023
- Tersedia Online: 30 September 2023

### ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Utara tertinggal dari kabupaten/kota yang sama-sama merupakan kabupaten/kota awal sejak berdirinya Provinsi Lampung tahun 1964 dan bahkan tertinggal dari kabupaten pemekarannya. Kondisi ini merupakan anomali bila dikaitkan dengan teori neo klasik yang menyatakan bila pembangunan telah berjalan dalam waktu lama maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun (convergen). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ketertinggalan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara dibandingkan dengan kabupaten/kota yang dibentuk bersamaan dengan berdirinya Provinsi Lampung. Metode penelitian dilakukan melalui analisa kualitatif menggunakan data kuantitatif yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dari komponen IPM yang ada, indeks kesehatan dan indeks pengeluaran merupakan komponen yang berkontribusi dalam menyebabkan kesenjangan (ketertinggalan) pencapaian IPM di Kabupaten Lampung Utara. Indeks pengeluaran merupakan indeks yang paling dominan menyebabkan kesenjangan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara. Pencapaian indeks pendidikan Kabupaten Lampung Utara tertinggi kedua setelah Kota Bandar Lampung di antara kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung terutama dikarenakan pencapaian rata-rata lama sekolah (RLS) yang baik. Untuk mengejar ketertinggalan dalam pencapaian IPM, maka Kabupaten Lampung Utara perlu lebih memfokuskan pembangunan ekonomi agar pendapatan per kapita meningkat, di samping program di bidang kesehatan juga perlu ditingkatkan.

**Kata Kunci :** Kesenjangan, Indeks Pembangunan Manusia, Lampung Utara

### ABSTRACT

The Human Development Index (HDI) of North Lampung Regency lags behind the regencies/cities which were both the original regencies/cities since the founding of Lampung Province in 1964 and even lagged behind the newly expanded regencies. This condition is an anomaly when linked to neo-classical theory which states that if development has been ongoing for a long time, differences in levels of prosperity between regions tend to decrease (converge). This article aims to analyze the lagging behind in the HDI achievement of North Lampung Regency compared to the districts/cities that were formed at the same time as the founding of Lampung Province. The research method was carried out through qualitative analysis using quantitative data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The results of the discussion show that of the HDI components, the health index and expenditure index are components that contribute to the gap (lag) in HDI achievement in North Lampung Regency. The expenditure index is the most dominant index causing the gap in HDI achievement in North Lampung Regency. The education index achievement of North Lampung Regency is the second highest after Bandar Lampung City among the initial districts/cities in Lampung Province, mainly due to the good average length of schooling (RLS). To catch up with the HDI achievement, North Lampung Regency needs to focus more on economic development so that per capita income increases, in addition to improving programs in the health sector.

**Keyword:** Gap, Human Development Index, North Lampung

## 1. PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang mulai diperhitungkan di samping indikator-indikator ekonomi maupun indikator fisik. Perhatian terhadap IPM sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan itu sejalan dengan pembaharuan konsep-konsep pembangunan, sebagaimana dikemukakan oleh Baur bahwa pembaharuan konsep-konsep pembangunan terus berlanjut ditandai dengan parameter dan indikator sosial yang mengenalkan jargon seberapa baik bukannya jargon seberapa banyak, tidak mengutamakan kualitas barang, namun lebih pada kualitas hidup (Purwoko, 2015). Ferawati menyebutkan bahwa IPM merupakan indikator sebagai tolok ukur pembangunan manusia (Ferawati, 2018). IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampak terhadap kondisi fisik (kesehatan dan kesejahteraan) maupun non-fisik (pendidikan) (Latuconsina, 2017).

Penerapan desentralisasi pembangunan melalui otonomi daerah telah memberikan harapan peran yang lebih besar dari daerah dalam pembangunan, sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah, termasuk di dalamnya pembangunan kualitas manusia. Namun, dalam realitanya, tidak serta merta daerah dapat melaksanakan kewenangan dengan efektif dalam meningkatkan pembangunan yang hasilnya diukur dengan berbagai indikator, termasuk IPM. Di Provinsi Lampung, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat fenomena menarik di mana salah satu kabupaten tertua yaitu Kabupaten Lampung Utara dalam tiga belas tahun terakhir (2010-2022) sering meraih capaian IPM terendah di antara kabupaten/kota yang merupakan kabupaten/kota awal sejak berdirinya Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada awal berdirinya di tahun 1964 terdiri dari Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang-Teluk Betung (sekarang Kota Bandar Lampung). Provinsi Lampung yang semula terdiri dari lima kabupaten/kota saat ini menjadi lima belas kabupaten/kota dengan beberapa kali proses pemekaran wilayah.

Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Lampung Utara mencapai 68,33. Pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 tersebut, di bawah Kabupaten Lampung Selatan dengan IPM 69,00, Kabupaten Lampung Tengah dengan IPM 70,80 dan Kota Bandar Lampung dengan IPM 78,01. IPM Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022 bahkan berada di bawah kabupaten yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara, yaitu Kabupaten Lampung Barat dengan IPM 68,39 dan Kabupaten Tulang Bawang dengan IPM 69,53.

Pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara yang lebih rendah dari kabupaten/kota yang sama-sama merupakan kabupaten/kota awal sejak berdirinya Provinsi Lampung, menjadi hal menarik untuk diamati. Selama lima puluh sembilan tahun terbentuk secara bersamaan dengan berdirinya Provinsi Lampung, kesenjangan hasil pembangunan, khususnya IPM, di antara kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung masih terjadi. Kondisi ini merupakan anomali di mana pembangunan sudah berlangsung lama sejak berdirinya Provinsi Lampung tahun 1964, namun masih terjadi kesenjangan di mana Kabupaten Lampung Utara tertinggal dalam pencapaian IPM dibandingkan kabupaten/kota awal lainnya di Provinsi Lampung, bahkan juga terhadap kabupaten yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara.

Untuk mengkaji terjadinya kesenjangan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimaksud, maka perlu melihat komponen-komponen IPM yaitu indeks kesehatan (angka harapan hidup), indeks pendidikan dan indeks pengeluaran yang merupakan ukuran standar hidup layak (Yogi et al., 2018). Untuk mewujudkan pembangunan yang baik ketiga dimensi IPM harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya (Wahyuningsih, 2019). Oleh karena itu variabel-variabel yang terkait dengan dimensi-dimensi IPM perlu mendapatkan perhatian yang sama. Untuk dimensi kesehatan, maka pemerintah perlu memberikan perhatian kepada angka harapan hidup (AHH). Harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan pada dimensi pendidikan. Pada dimensi standar hidup layak atau perekonomian, pengeluaran per kapita perlu mendapat perhatian. Pengeluaran per kapita ini akan terkait dengan bagaimana pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di suatu wilayah.

Dalam teori ekonomi, konsep kesejahteraan masyarakat dikenal dengan ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*) yang intinya adalah menjelaskan alokasi faktor produksi serta barang dan jasa dalam suatu perekonomian kepada seluruh masyarakat atau menjelaskan interaksi ekonomi untuk mewujudkan kondisi bagi pemanfaatan sumber daya secara efisien (Wahyuningsih, 2019).

Penelitian-penelitian yang lebih dahulu terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Hakim dengan judul “Indeks Pembangunan Manusia Indonesia” yang menyimpulkan bahwa produk domestik bruto (PDB), pajak pendapatan dan krisis ekonomi memiliki pengaruh terhadap pencapaian IPM. Sedangkan desentralisasi belum mampu memberikan pengaruh untuk peningkatan kesejahteraan yang dapat mendorong peningkatan IPM (Setiawan & Hakim, 2013). Penelitian lainnya adalah: “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel”, dengan hasil bahwa aspek yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia adalah aspek kependudukan dan kesehatan yang meliputi jumlah penduduk, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan; aspek kependudukan dan pendidikan yang meliputi jumlah penduduk dan sarana pendidikan; aspek kesehatan yaitu jumlah tenaga kesehatan (Latuconsina, 2017). Selain itu, penelitian lainnya adalah penelitian mengenai, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Periode 2013-2015”, yang menghasilkan kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Pratiwi & Nurdiawansyah, 2019). Penelitian-penelitian tersebut belum ada yang secara spesifik membahas kesenjangan atau ketertinggalan suatu daerah dalam pencapaian IPM bila dibandingkan dengan daerah yang pada awalnya bersamaan waktu dalam pembentukannya.

Dengan uraian di atas, muncul pertanyaan atau permasalahan yang perlu dijawab yaitu: bagaimana dan mengapa kesenjangan atau ketertinggalan Kabupaten Lampung Utara dalam pencapaian IPM terjadi? Menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara dan menjelaskan kenapa kesenjangan tersebut terjadi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan data-data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisa dilakukan dengan membandingkan capaian IPM Kabupaten Lampung Utara dengan capaian IPM kabupaten/kota yang lebih tinggi dari Kabupaten Lampung Utara. Untuk mendapatkan perbandingan yang lebih setara dari sisi waktu terbentuknya kabupaten/kota, pada tulisan ini penulis membatasi pada kabupaten/kota awal, yaitu kabupaten/kota yang terbentuk bersamaan pada saat berdirinya Provinsi Lampung. Perbandingan dimaksud untuk melihat trend pertumbuhan IPM dan komponen yang mempengaruhi capaian IPM.

## 2. DATA DAN METODE

### 2.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung melalui akses data di *website* BPS Lampung. Data dimaksud ada yang merupakan data asli dari BPS maupun data olahan yang merupakan pengembangan penulis dari data BPS. Data-Data yang berasal dari BPS Provinsi Lampung pada periode tahun 2017-2021 meliputi data IPM, data angka harapan hidup (AHH), data harapan lama sekolah (HLS), data rata-rata lama sekolah (RLS) dan data pengeluaran per kapita. Sedangkan data-data yang diolah atau merupakan pengembangan dari data BPS adalah data pertumbuhan IPM, data kesenjangan pencapaian IPM, indeks kesehatan, indeks Pendidikan, indeks pengeluaran.

Dengan data tersebut di atas, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Ikbar menuliskan bahwa sumber informasi dokumenter yang sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya (Ikbar, 2014). Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data resmi karena berasal dari BPS yang merupakan badan resmi. Data atau dokumen resmi adalah dokumen baik yang berasal dari sumber-sumber

primer maupun sekunder yang dibuat atau dikumpulkan oleh badan-badan resmi (Ikbar, 2014). Data-data yang digunakan tersebut adalah data statistik, yaitu kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan masalah tertentu (Unas, 2020).

## 2.2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut C. Marshall dan Rosman (Sarosa, 2021:7) penelitian kualitatif adalah penelitian yang tatanan dilakukan pada alamiah yang menggunakan berbagai metode yang manusiawi, berfokus pada konteks fenomena, berkembang dan secara mendasar menganut paham *interpretive*. Jadi penelitian ini dilakukan dengan menginterpretasikan data guna mendapatkan jawaban mengapa pencapaian IPM di Kabupaten Lampung Utara tertinggal dari kabupaten/kota yang terbentuk sejak awal berdirinya Provinsi Lampung.

Meskipun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, namun menggunakan data yang bersifat numerik (data kuantitatif). Penggunaan data kuantitatif untuk penelitian yang bersifat kualitatif merupakan hal yang dapat dilakukan, meskipun terdapat pemahaman umum yang menganggap bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan data yang bersifat numerik. Dalam hal ini, Sarosa menuliskan bahwa banyak yang salah kaprah bahwa penelitian kualitatif pasti menggunakan data non numerik. Penelitian kualitatif sering disalahartikan sebagai penelitian yang tidak perlu berurusan dengan data dan dengan sendirinya tidak menggunakan alat statistika untuk mengolah data (Sarosa, 2021:7).

Analisis dilakukan dengan perbandingan capaian IPM antar kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung untuk melihat *trend* pertumbuhan IPM serta komponen-komponen yang berpengaruh terhadap capaian IPM. Perhitungan untuk melihat pertumbuhan dan komponen-komponen yang mempengaruhi IPM dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Pertumbuhan IPM

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan pencapaian terkini dengan pencapaian tahun sebelumnya. Formulasi perhitungan pertumbuhan IPM sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$IPM_t$  : IPM pada tahun t

$IPM_{t-1}$  : IPM pada tahun t-1

(Nugroho et al., 2022).

Sedangkan untuk mengetahui pertumbuhan per tahun dalam beberapa tahun dapat digunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Tahunan} = \left[ \left( \frac{f}{s} \right)^{1/y} - 1 \right] \times 100$$

Keterangan:

f : *final value* (nilai akhir)

s : *start value* (nilai awal)

y : *year* (jumlah tahun = tahun akhir – tahun awal)

(Lewis, 2022).

Dengan formulasi tersebut, maka bila disesuaikan dengan formulasi perhitungan IPM, formulasi tersebut menjadi:

$$\text{Pertumbuhan IPM per tahun} = \left[ \left( \frac{IPM_t}{IPM_{t-1}} \right)^{1/y} - 1 \right] \times 100$$

Keterangan:

$IPM_t$  : IPM pada tahun t (akhir)

$IPM_{t-1}$  : IPM pada tahun t-1 (awal)

y : year (jumlah tahun = tahun terakhir – tahun awal)

#### b. Komponen IPM

Yogi et al., menuliskan bahwa ada 3 komponen yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia, yaitu angka harapan hidup, indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran (Yogi et al., 2018). Badan Pusat Statistik menggunakan komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimaksud dengan istilah indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia, ketiga komponen tersebut harus dihitung terlebih dahulu indeksinya masing-masing. Rumus perhitungan indeks-indeks tersebut adalah sebagai berikut:

Indeks kesehatan atau indeks usia harapan hidup saat lahir (UHH) dihitung berdasarkan angka harapan hidup (AHH), angka harapan hidup minimum ( $AHH_{min}$ ) dan angka harapan hidup maksimum ( $AHH_{maks}$ ), dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Indeks pendidikan merupakan rata-rata dari indeks harapan lama sekolah (HLS) dan indeks rata-rata lama sekolah (RLS). HLS dan RLS masing-masing dihitung dengan menggunakan nilai minimum dan maksimum. Formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{\text{Pendidikan}} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

Indeks pengeluaran dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita, pengeluaran minimum dan pengeluaran maksimum dengan formulasi menggunakan perhitungan logaritma normal sebagai berikut:

$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{Pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Nilai minimum dan maksimum dari setiap komponen IPM tersebut di atas, selengkapnya dirinci dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

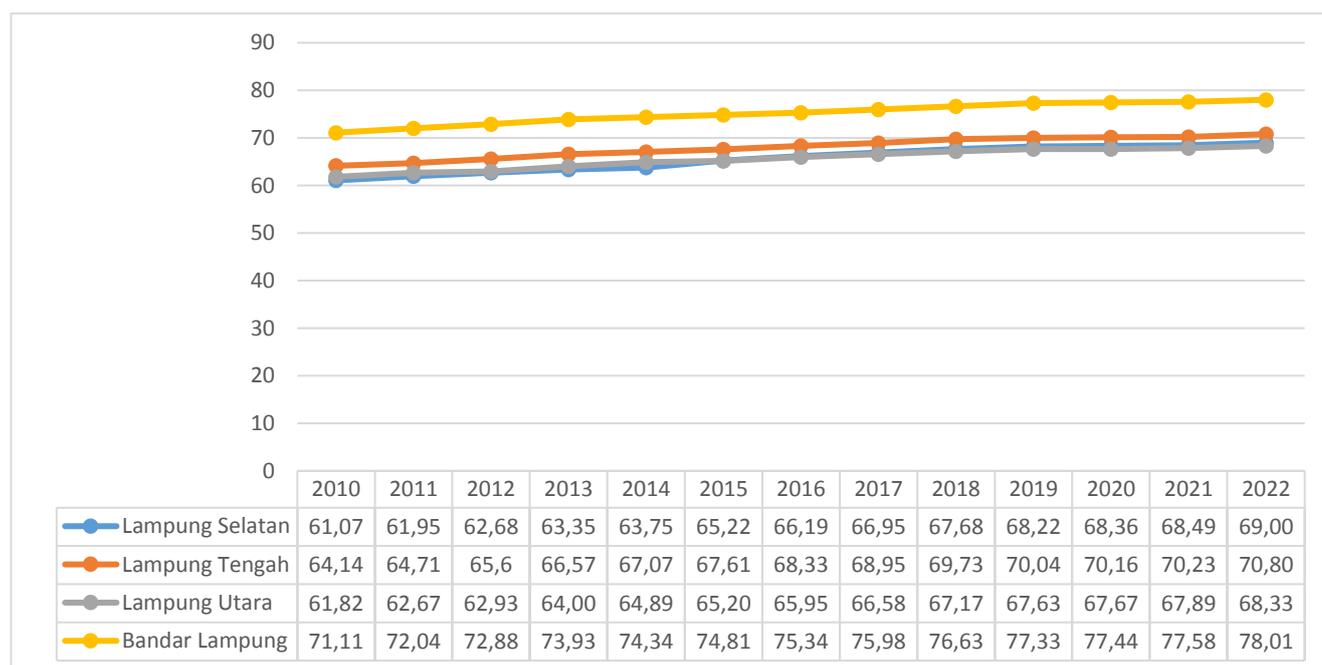
Sumber: Nugroho et al., 2022

Setelah perhitungan indeks dari masing-masing komponen IPM tersebut di atas, maka IPM dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{Ikesehatan \times Ipendidikan \times Ipengeluaran} \times 100\%$$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 menjelaskan data dan grafik capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2010-2022.



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

**Gambar 1.** Grafik Pencapaian IPM Kabupaten/Kota Awal di Provinsi Lampung

Data pada Gambar 1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2010– 2022, pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara tertinggal dari kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung. Pada tahun 2010 – 2014 capaian IPM Kabupaten Lampung Utara berada pada urutan kedua terbawah setelah Kabupaten Lampung Selatan. Namun sejak tahun 2015 hingga 2022, capaian IPM Kabupaten Lampung Utara selalu merupakan yang terendah. Dengan menggunakan formulasi perhitungan pertumbuhan IPM selama lima

tahun terakhir maupun per tahun sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan metode, didapatkan hasil sebagaimana pada Tabel 2.

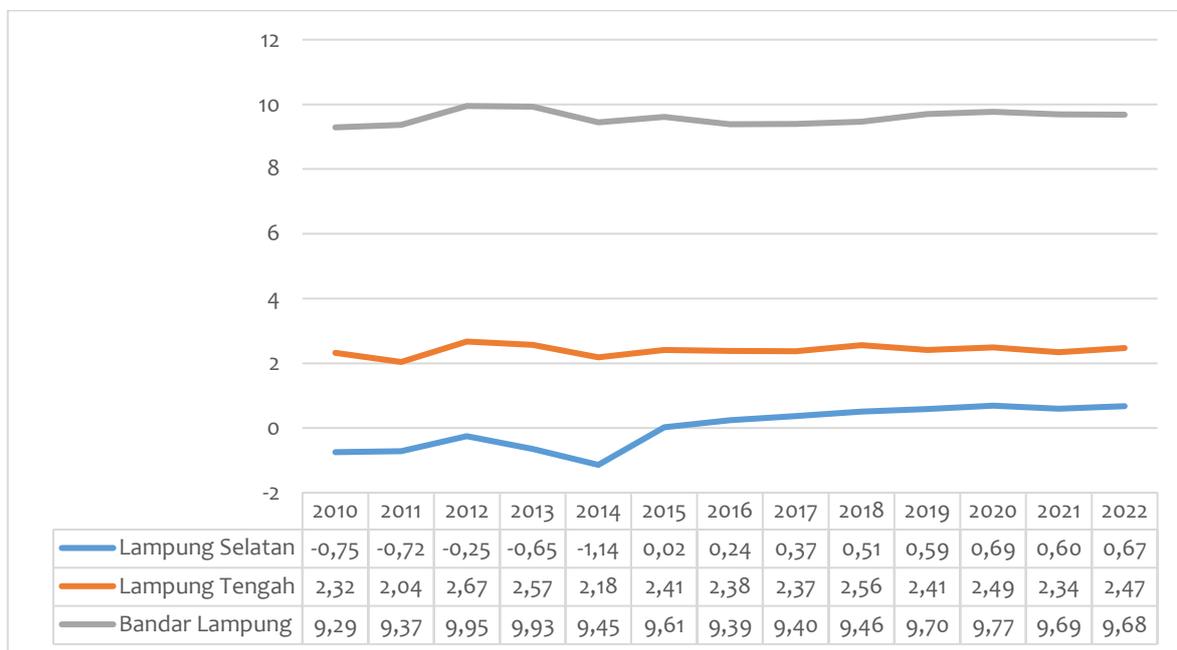
**Tabel 2.** Tingkat Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Awal di Provinsi Lampung

Wilayah	Tingkat Pertumbuhan IPM Selama 12 tahun (%)	Tingkat Pertumbuhan Per tahun (%)
Lampung Selatan	12,99	1,02
Lampung Tengah	10,38	0,83
Lampung Utara	10,53	0,84
Bandar Lampung	9,70	0,77

Sumber: Diolah Dari Data BPS Provinsi Lampung, 2022

Dari data pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan IPM Kabupaten Lampung Utara dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, yaitu dua belas tahun, sebesar 10,53% dan tingkat pertumbuhan per tahun 0,84%. Tingkat pertumbuhan IPM Kabupaten Lampung Utara lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan IPM Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai 10,38% untuk pertumbuhan selama dua belas tahun dan 0,83% untuk pertumbuhan per tahun. Tingkat pertumbuhan IPM Kabupaten Lampung Utara juga lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan IPM Kota Bandar Lampung yang mencapai 9,70% dalam kurun waktu dua belas tahun dan 0,77% untuk pertumbuhan per tahun. Tingkat pertumbuhan IPM dua belas tahun maupun pertumbuhan per tahun yang dicapai Kabupaten Lampung Utara lebih tinggi dari Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung, namun belum dapat mengubah urutan capaian IPM Kabupaten Lampung Utara dimana capaian IPM Kabupaten Lampung Utara merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung.

Grafik pada Gambar 2 menggambarkan trend kesenjangan (selisih capaian) IPM Kabupaten Lampung Utara dengan kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung.



Sumber: Diolah dari Data BPS Provinsi Lampung, 2023

**Gambar 2.** Grafik Trend Kesenjangan IPM Kabupaten Lampung Utara Terhadap Kabupaten/Kota Awal di Provinsi Lampung

Jarak kesenjangan capaian IPM Kabupaten Lampung Utara terhadap kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung secara umum menunjukkan *trend* yang meningkat. Pada tahun 2020 kesenjangan tersebut terlihat menurun, namun pada tahun 2022 kesenjangan IPM Kabupaten Lampung Utara terhadap kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung kembali meningkat.

Teori neo klasik (*Neo-Classic Theory*) yang dipelopori oleh Bort Stein (1964) dan dikembangkan oleh Roman (1965) dan Siebert (1969), menyatakan bahwa negara yang sedang berkembang, pada saat proses pembangunan baru dimulai, tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung menjadi tinggi (*divergence*). Bila pembangunan telah berjalan dalam waktu lama, perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun (*covergen*) (Sosiologi, 2017). Adanya kesenjangan capaian IPM yang cenderung meningkat, di mana Lampung Utara selalu berada pada urutan paling bawah dari kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung dan sebagaimana diuraikan di pendahuluan bahwa IPM Kabupaten Lampung Utara berada di bawah kabupaten pemekarannya, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tulang Bawang, maka hal ini menjadi sebuah anomali bila dikaitkan dengan teori neo klasik tersebut.

Mengacu kepada teori dimaksud, dalam kurun waktu lima puluh delapan tahun sejak berdirinya Provinsi Lampung, dari kabupaten/kota yang berdiri bersamaan pada awal pembentukan Provinsi, diharapkan tingkat kesenjangan dalam pencapaian hasil-hasil pembangunan, termasuk IPM, semakin berkurang. Faktanya, sampai dengan tahun 2022, dari empat kabupaten/kota yang terbentuk sejak awal berdirinya Provinsi Lampung, masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam pencapaian IPM. Ada dua kabupaten/kota yang berada dalam capaian IPM kategori tinggi yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. Sedangkan dua Kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan berada pada capaian IPM kategori rendah. Kategori IPM ini berdasarkan kategori BPS yang membagi empat kategori yaitu : sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ), tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ), sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ), dan rendah ( $IPM < 60$ ) (Susanto & Puspaningrum, 2020).

Dengan *trend* kesenjangan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara terhadap kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung dalam satu dekade lebih (2010-2022) yang cenderung meningkat sesuai dengan Gambar 1, jika mengacu pada teori neo klasik, maka proses untuk mencapai kondisi konvergen dengan capaian IPM kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung lainnya masih membutuhkan waktu yang lama. Lima puluh delapan tahun terbentuknya Provinsi Lampung beserta kabupaten/kota dimaksud, belum dapat menghilangkan kesenjangan, khususnya dalam pencapaian IPM.

Melihat pertumbuhan IPM dari masing-masing kabupaten/kota yang berdiri bersamaan dengan pembentukan Provinsi Lampung sebagaimana dalam Tabel 3, jika diasumsikan tidak terjadi perubahan pertumbuhan (pertumbuhan per tahun tetap), dengan perhitungan pertumbuhan IPM per tahun dikalikan tahun sebelumnya, maka IPM Kota Bandar Lampung akan berubah kategori menjadi sangat tinggi pada tahun 2025 dengan skor 80,46; Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2036 dengan skor 80,36; Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2036 dengan skor 80,11; dan Kabupaten Lampung Utara baru bisa menyamakan kategori IPM dengan tiga kabupaten/kota lainnya pada tahun 2040 dengan skor 80,07. Bila pertumbuhan per tahun tetap, maka pada tahun 2042 (dua dekade dari tahun 2022) capaian IPM masing-masing kabupaten/kota tersebut adalah: Bandar Lampung (91,73), Lampung Selatan (85,44), Lampung Tengah (84,16), dan Lampung Utara (81,42). Dengan demikian, bila tidak ada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan IPM per tahun, Kabupaten Lampung Utara akan tetap berada pada urutan terbawah capaian IPM di antara Kabupaten/Kota awal di Provinsi Lampung.

Sebagaimana telah di uraikan pada bagian metode, bahwa untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbatat tiga komponen yang digunakan, yaitu: indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Berdasarkan ketiga komponen tersebut, maka perlu dilihat pencapaian masing-masing indeks di kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung untuk mengetahui indeks mana yang membuat Lampung Utara tertinggal dari kabupaten/kota lainnya.

a. Indeks Kesehatan

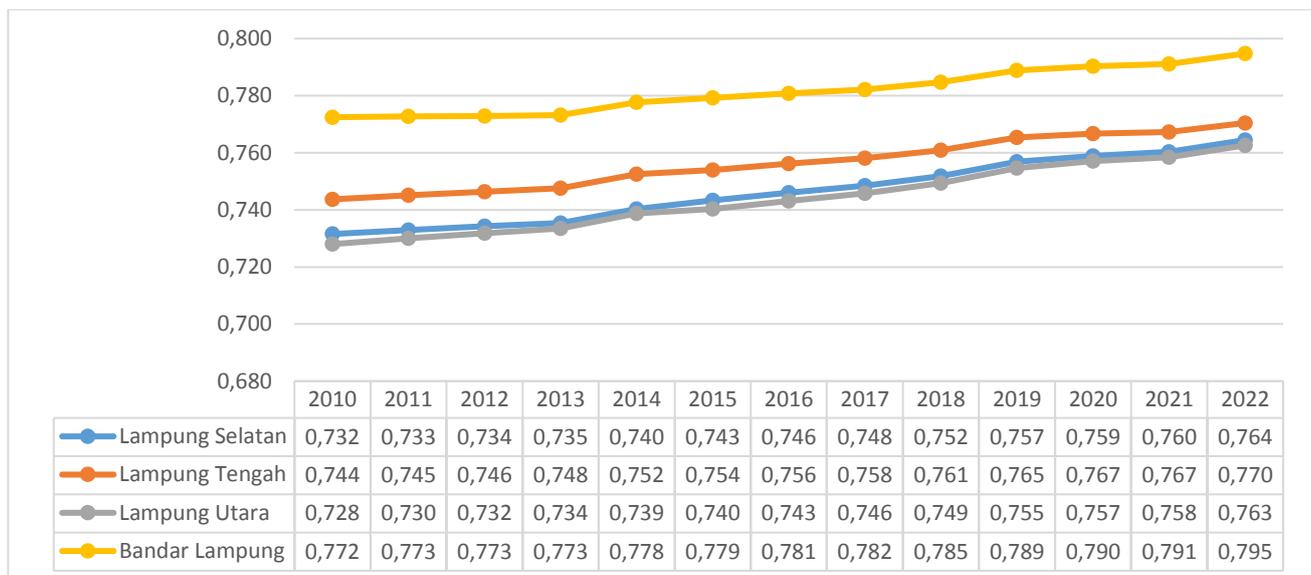
Indeks kesehatan dihitung dari angka harapan hidup (AHH). Tabel 3 menunjukkan AHH kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung pada kurun waktu tahun 2010-2022.

**Tabel 3.** Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Awal di Provinsi Lampung

Wilayah	Angka Harapan Hidup (Tahun)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lampung Selatan	67,55	67,64	67,73	67,80	68,12	68,32	68,49
Lampung Tengah	68,34	68,43	68,51	68,59	68,91	69,01	69,15
Lampung Utara	67,32	67,45	67,57	67,68	68,02	68,12	68,3
Bandar Lampung	70,21	70,23	70,24	70,26	70,55	70,65	70,75
Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Lampung Selatan	68,65	68,87	69,2	69,33	69,42	69,69	
Lampung Tengah	69,28	69,46	69,75	69,84	69,87	70,08	
Lampung Utara	68,48	68,71	69,05	69,21	69,3	69,57	
Bandar Lampung	70,84	71,01	71,28	71,37	71,42	71,66	

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Dari angka harapan hidup sebagaimana Tabel 3, dengan menggunakan formula sebagaimana diuraikan pada pembahasan metode, maka didapatkan indeks kesehatan. Gambar 3 mengilustrasikan pencapaian indeks kesehatan kabupaten/kota awal di provinsi Lampung pada tahun 2010-2022.



Sumber: Diolah dari Data BPS Lampung, 2022

**Gambar 3.** Grafik Pencapaian Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota Awal di Provinsi Lampung Tahun 2010 -2022

Grafik dan data pada Gambar 3 memberikan gambaran bahwa Lampung Utara tertinggal dari kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung dalam pencapaian indeks kesehatan. Dalam kurun waktu 2010-2022 pencapaian indeks kesehatan di Kabupaten Lampung Utara merupakan pencapaian yang terendah dari kabupaten/kota yang terbentuk sejak awal berdirinya Provinsi Lampung.

b. Indeks Pendidikan

Tabel 4 dan Tabel 5 memuat data yang menjadi dasar untuk menghitung indeks pendidikan, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah pada kurun waktu 2010-2022.

**Tabel 4.** Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Awal di Provinsi Lampung

Wilayah	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lampung Selatan	10,86	10,89	10,92	10,95	10,98	11,65	11,68
Lampung Tengah	10,48	10,69	11,27	11,89	12,16	12,2	12,21
Lampung Utara	11,38	11,38	11,39	12,04	12,38	12,41	12,42
Bandar Lampung	12,2	12,6	13,05	13,22	13,31	13,35	13,67

Wilayah	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung Selatan	12,05	12,17	12,33	12,50	12,52	12,54
Lampung Tengah	12,60	12,9	12,91	12,92	12,93	12,95
Lampung Utara	12,43	12,44	12,47	12,48	12,49	12,54
Bandar Lampung	13,87	14,23	14,53	14,64	14,70	14,71

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

**Tabel 5.** Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Awal di Provinsi Lampung

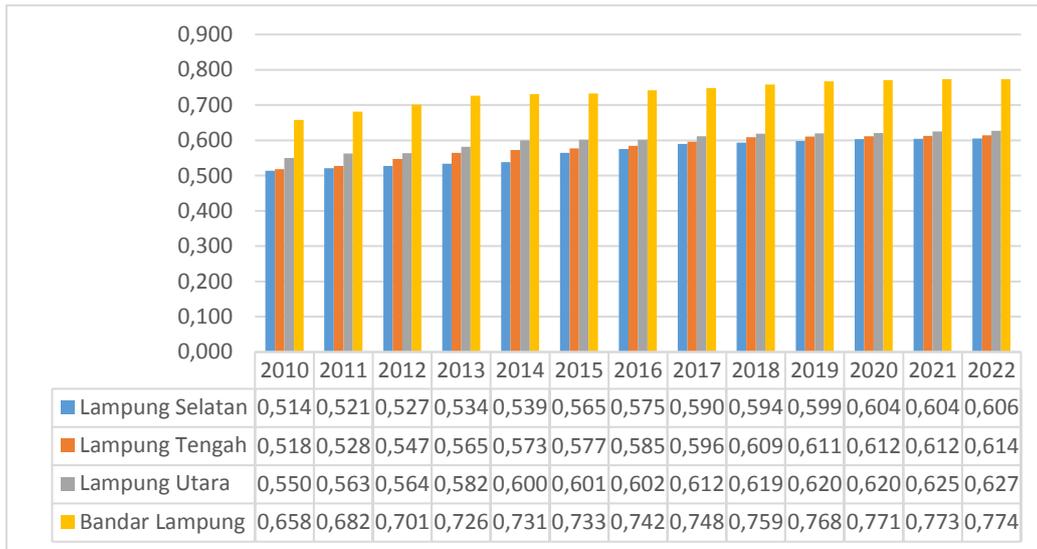
Wilayah	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lampung Selatan	6,36	6,55	6,72	6,89	7,01	7,24	7,53
Lampung Tengah	6,82	6,92	7,03	7,04	7,06	7,14	7,37
Lampung Utara	7,01	7,41	7,42	7,42	7,69	7,7	7,71
Bandar Lampung	9,56	9,95	10,16	10,77	10,85	10,87	10,88

Wilayah	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung Selatan	7,66	7,67	7,68	7,69	7,70	7,72
Lampung Tengah	7,38	7,51	7,57	7,58	7,59	7,64
Lampung Utara	7,99	8,19	8,20	8,21	8,34	8,35
Bandar Lampung	10,89	10,90	10,92	10,93	10,95	10,96

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Dari data harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) pada Tabel 4 dan Tabel 5, maka dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diuraikan dalam bagian metode, didapatkan indeks HLS dan indeks RLS yang kemudian dari rata-rata keduanya didapatkan data indeks pendidikan. Gambar 4 mengilustrasikan indeks pendidikan kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2022.



Sumber: Diolah BPS Provinsi Lampung, 2023

**Gambar 4.** Diagram Pencapaian Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota Awal di Provinsi Lampung

Meskipun pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara dalam kurun waktu 2015-2022 merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota awal Provinsi Lampung, namun pencapaian indeks pendidikan dalam kurun waktu 2010-2022 justru menempati urutan kedua setelah Kota Bandar Lampung. Pencapaian indeks pendidikan Kabupaten Lampung Utara ini didukung oleh pencapaian rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dari dua kabupaten lainnya (Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah), meskipun pada pencapaian harapan lama sekolah tidak selalu menempati urutan di bawah Kota Bandar Lampung, di mana tahun 2020-2022 pencapaian harapan lama sekolah merupakan pencapaian terendah di antara kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung.

c. Indeks Pengeluaran

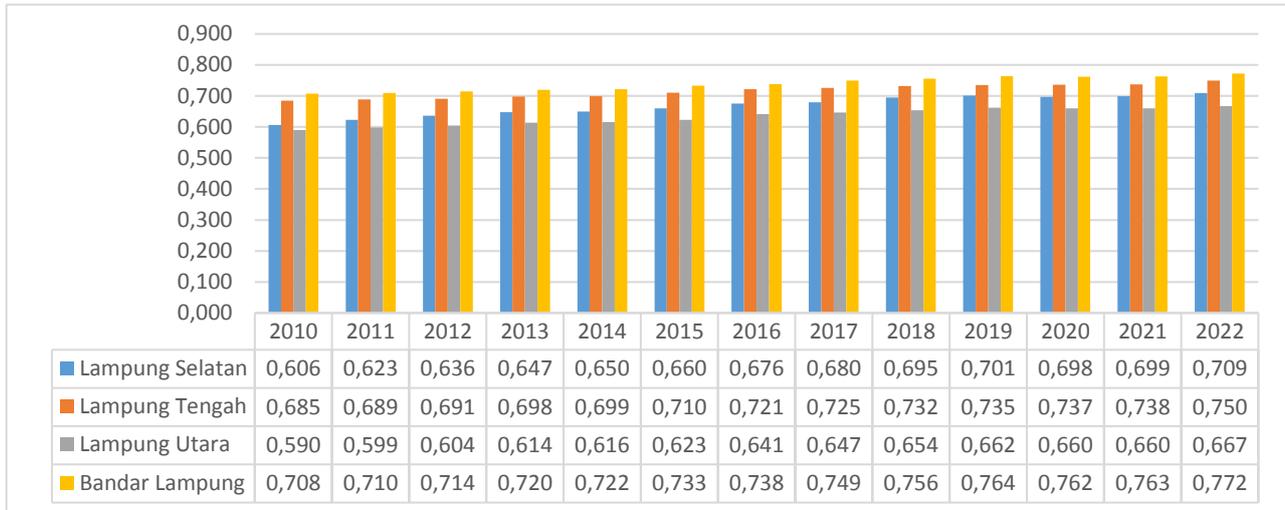
Tabel 6 menyajikan data pengeluaran per kapita pada kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung berdasarkan data dari BPS Provinsi Lampung tahun 2010-2022.

**Tabel 6.** Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Awal di Provinsi Lampung (Rp/Orang/Tahun)

Wilayah	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lampung Selatan	7.321	7.730	8.076	8.384	8.441	8.746	9.189
Lampung Tengah	9.468	9.612	9.671	9.895	9.935	10.298	10.674
Lampung Utara	6.950	7.142	7.276	7.513	7.567	7.729	8.212
Bandar Lampung	10.209	10.282	10.429	10.618	10.702	11.090	11.266
Wilayah	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Lampung Selatan	9.310	9.781	9.978	9.875	9.931	10.266	
Lampung Tengah	10.820	11.052	11.154	11.219	11.259	11.710	
Lampung Utara	8.369	8.559	8.779	8.733	8.737	8.951	
Bandar Lampung	11.699	11.952	12.255	12.197	12.247	12.593	

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 6 maka dengan menggunakan formulasi perhitungan indeks pengeluaran di dapatkan data indeks pengeluaran. Gambar 5 mengilustrasikan pencapaian indeks pengeluaran kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2022.

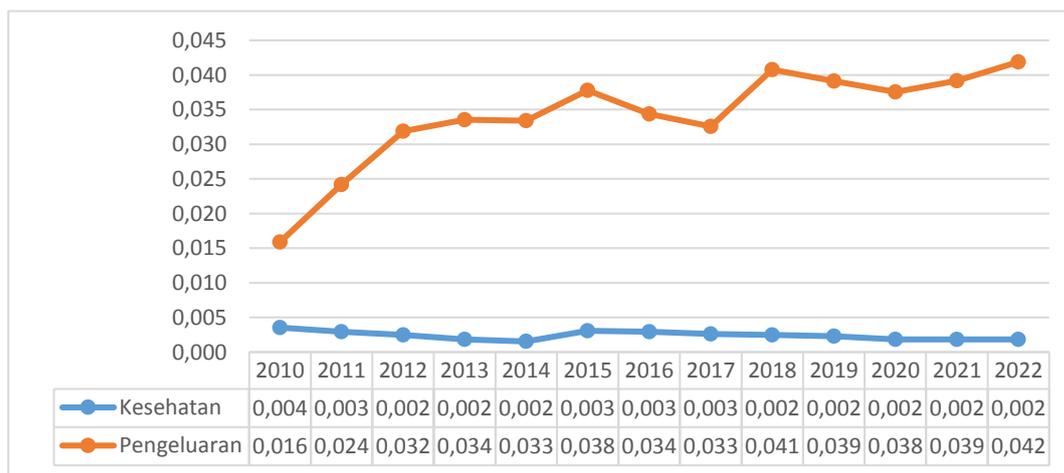


Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Lampung, 2023

**Gambar 5.** Diagram Indeks Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Awal di Provinsi Lampung

Dari diagram dan data indeks pengeluaran pada Gambar 5 diketahui bahwa dari kurun waktu 2010-2022 pencapaian indeks pengeluaran di Kabupaten Lampung Utara selalu menempati urutan terbawah dari pencapaian indeks pengeluaran kabupaten/kota lainnya yang bersamaan terbentuk sejak berdirinya Provinsi Lampung.

Dengan uraian mengenai komponen-komponen perhitungan IPM di atas, maka komponen yang memberikan kontribusi terhadap kesenjangan sehingga Kabupaten Lampung Utara mempunyai pencapaian IPM terendah di antara kabupaten/kota awal Provinsi Lampung adalah indeks kesehatan dan indeks pengeluaran. Dengan membandingkan pencapaian indeks kesehatan dan indeks pengeluaran Kabupaten Lampung Utara terhadap kabupaten/kota awal Provinsi Lampung lainnya, didapatkan data bahwa selisih terdekat adalah dengan Kabupaten Lampung Selatan (berada tepat di atas pencapaian Kabupaten Lampung Utara). Gambar 6 menampilkan ilustrasi selisih pencapaian indeks kesehatan dan indeks pengeluaran dari kedua kabupaten dimaksud.



Sumber: Diolah dari data BPS Provinsi Lampung, 2022

**Gambar 6.** Selisih Pencapaian Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Utara

Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa selisih pencapaian indeks pengeluaran lebih besar dari pada selisih indeks kesehatan. Dengan demikian, maka indeks pengeluaran lebih besar kontribusinya terhadap kesenjangan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara. Untuk membuktikannya, dapat dilakukan simulasi dengan mengambil contoh satu tahun terakhir (2022). Pada simulasi ini, untuk indeks pengeluaran dan indeks kesehatan disimulasikan menyamai capaian Kabupaten Lampung Selatan yang berada tepat di atas Kabupaten Lampung Utara. Untuk indeks pendidikan, disimulasikan tetap, karena indeks pendidikan Kabupaten Lampung Utara sudah di atas Kabupaten Lampung Selatan (berada pada urutan kedua setelah Kota Bandar Lampung). Tabel 7 menunjukkan simulasi untuk pencapaian IPM dengan menggunakan formulasi perhitungan IPM.

**Tabel 7.** Simulasi Perhitungan IPM Lampung Utara Pada Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran

Simulasi	Indeks Kesehatan	Indeks Pendidikan	Indeks Pengeluaran	IPM
Simulasi A	0,764	0,627	0,667	68,38
Simulasi B	0,763	0,627	0,709	69,73
Simulasi C	0,764	0,627	0,709	69,78

Sumber: Diolah Dari Data BPS Provinsi Lampung, 2022

Keterangan:

- Simulasi A: Jika pencapaian indeks kesehatan Kabupaten Lampung Utara dapat menyamai pencapaian Kabupaten Lampung Selatan
- Simulasi B: Jika pencapaian indeks pengeluaran Kabupaten Lampung Utara dapat menyamai pencapaian Kabupaten Lampung Selatan
- Simulasi C: Jika pencapaian indeks kesehatan dan indeks pengeluaran Kabupaten Lampung Utara dapat menyamai pencapaian Kabupaten Lampung Selatan.

Dari simulasi di atas, maka terbukti bahwa indeks pengeluaran merupakan komponen yang paling mempengaruhi kesenjangan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara dibandingkan indeks kesehatan. Dalam simulasi tersebut, bila komponen kesehatan ditingkatkan hingga pencapaian indeksnya menyamai pencapaian indeks kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, maka pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara meningkat sebanyak 0,05 dari 68,33 menjadi 68,88. Namun bila yang ditingkatkan hingga menyamai pencapaian Kabupaten Lampung Selatan adalah indeks pengeluaran, maka akan terjadi peningkatan sebesar 1,40 dari 68,33 menjadi 69,73. Dan bila kedua komponen (kesehatan dan pengeluaran) ditingkatkan dan menyamai pencapaian Kabupaten Lampung Selatan, maka akan meningkatkan IPM sebesar 1,45 dari 68,33 menjadi 69,78.

Dengan demikian, maka pencapaian indeks pengeluaran merupakan pencapaian indeks yang paling dominan menyebabkan kontribusi kesenjangan pencapaian IPM di Kabupaten Lampung Utara, di samping pencapaian indeks kesehatan. Upaya meningkatkan IPM di tahun-tahun mendatang, dapat dilakukan dengan lebih memfokuskan pencapaian indeks pengeluaran dengan program-program pembangunan yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Upaya peningkatan pencapaian indeks pengeluaran perlu juga disertai dengan upaya peningkatan indeks kesehatan dengan program-program di bidang kesehatan.

Dengan adanya ketertinggalan pada aspek indeks pengeluaran dan indeks kesehatan, sementara pada aspek indeks pendidikan Kabupaten Lampung Utara telah berada di atas dua kabupaten lainnya, kecuali Kota Bandar Lampung, maka dimungkinkan faktor perekonomian berpengaruh terhadap rendahnya pencapaian IPM dan pertumbuhan IPM di Kabupaten Lampung Utara sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.

Menurut Sjafrizal kesenjangan ekonomi antar wilayah menjadi aspek yang umum terjadi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Ada kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah (Iskandar & Saragih, 2018). Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang tepat diperlukan agar daerah-daerah yang tertinggal dapat melakukan terobosan-terobosan untuk mengejar ketertinggalan

daerah yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila dilaksanakan dengan baik, otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di daerahnya, sehingga dapat menjadi salah satu cara bagi daerah yang tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh daerah adalah bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan (Sumirat, 2019). Kesenjangan antar wilayah perlu dilihat juga dalam berbagai aspek secara komprehensif, dikarenakan kesenjangan dapat disebabkan berbagai faktor. Sebagaimana dikemukakan oleh Gadjos bahwa kesenjangan wilayah merupakan perbedaan atau ketidaksamaan karakteristik, fenomena atau kondisi lokasi dan terjadi minimal di antara dua entitas dari struktur wilayah. Karenanya, ketimpangan harus dinilai dari berbagai aspek seperti: sosial, kondisi lokasi, politik dan administrasi, kelembagaan, lingkungan, infrastruktur umum, dan lain-lain (Sumirat, 2019).

Untuk kesenjangan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara yang tertinggal dari kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung, berdasarkan pembahasan di atas, lebih didominasi oleh komponen ekonomi (indeks pengeluaran) dan ditambah dengan ketertinggalan dalam indeks kesehatan. Karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu lebih memperhatikan kedua komponen IPM tersebut, terutama aspek ekonomi. Terkait pertumbuhan ekonomi, antara lain dapat dilihat pada teori *export base* atau *teori economic base* yang dikembangkan oleh North (1955), yang menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan industri ekspornya. Bila permintaan eksternal barang dan jasa yang dihasilkan dan diekspor dari suatu wilayah tinggi, maka wilayah tersebut akan memiliki kekuatan ekonomi yang baik (Wilsonyudho, 2009). Mengacu kepada teori ini, Kabupaten Lampung Utara perlu memetakan lagi kekuatan ekonominya yang paling strategis untuk dikembangkan, terutama kegiatan ekonomi yang berpotensi menghasilkan komoditas ekspor. Di samping teori *export base* atau *economic base*, teori pertumbuhan wilayah neo klasik yang dikembangkan oleh Richardson (1973), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah berhubungan dengan tiga faktor penting, yakni tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi (Wilsonyudho, 2009:168). Aspek-aspek ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan modal (tingkat investasi) serta penerapan teknologi juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat apabila ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Akan tetapi dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia (Wahyuningsih, 2019).

Teori-teori pertumbuhan di atas, lebih terkait dengan aspek pertumbuhan ekonomi, di mana pencapaian IPM juga terkait dengan aspek pertumbuhan ekonomi, terutama pada komponen indeks pengeluaran yang dihitung dari pengeluaran per kapita, maka teori tersebut relevan untuk melihat lebih jauh lagi kenapa indeks pengeluaran Kabupaten Lampung Utara tertinggal dari kabupaten/kota awal lainnya di Provinsi Lampung. Namun, untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang aspek pertumbuhan ekonomi dan keterkaitannya dengan pencapaian IPM perlu dilakukan penelitian tersendiri. Penelitian ini memiliki batasan pada komponen-komponen apa yang menyebabkan capaian IPM Kabupaten Lampung Utara berada pada posisi terendah dibanding, namun tidak lebih jauh dapat menjelaskan mengapa komponen-komponen IPM dimaksud rendah pencapaiannya.

Indeks kesehatan yang juga menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi capaian IPM Kabupaten Lampung Utara pada posisi terendah dibandingkan kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung, dapat dimungkinkan juga dipengaruhi oleh aspek perekonomian, dengan pemahaman bahwa pada tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai, orang dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan kesehatannya, bukan hanya pada tahap pengobatan ketika mendapatkan gangguan kesehatan tetapi juga pada tahap pencegahan. Begitu pula dengan indeks pendidikan, semakin tinggi taraf perekonomian masyarakat, maka akses untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik semakin terbuka.

Di sisi Pemerintah Daerah, aspek-aspek keuangan daerah juga dimungkinkan akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam memberikan layanan pendidikan, layanan kesehatan maupun memberi stimulus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun hubungan dan keterpengaruhan aspek ekonomi dengan pencapaian IPM di Kabupaten Lampung Utara sebagaimana kemungkinan-kemungkinan dimaksud, masih perlu dibuktikan dengan penelitian-penelitian lanjutan dengan kajian-kajian yang lebih spesifik pada aspek ekonomi.

#### 4. KESIMPULAN

*Trend* kesenjangan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara dibandingkan dengan kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung dalam dua belas tahun terakhir (2010-2012) cenderung meningkat. Meskipun pertumbuhan IPM Kabupaten Lampung Utara selama dua belas tahun maupun per tahun lebih, tidak berada di urutan terbawah dari kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung, namun pertumbuhan IPM yang ada belum mampu memperbaiki peringkat pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara yang berpredikat terendah. Dilihat dari komponen-komponen IPM, pencapaian indeks pada komponen pendidikan, terutama rata-rata lama sekolah merupakan pencapaian yang cukup tinggi diraih oleh Kabupaten Lampung Utara di antara kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung. Pencapaian rata-rata lama sekolah menempati urutan kedua setelah kota Bandar Lampung pada kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung. Pencapaian rata-rata lama sekolah ini berdampak baik pada pencapaian indeks pendidikan. IPM Kabupaten Lampung Utara yang terendah di antara kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung dan bahkan dua kabupaten pemekarannya yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tulang Bawah meraih IPM yang lebih tinggi menjadi anomali, dimana menurut teori neo klasik bahwa semakin lama pembangunan berjalan maka seharusnya perbedaan atau kesenjangan semakin kecil.

Tertinggalnya Kabupaten Lampung Utara dalam pencapaian IPM terutama dipengaruhi rendahnya komponen kesehatan dan pengeluaran dibandingkan dengan kabupaten/kota awal Provinsi Lampung. Untuk mengejar ketertinggalan dimaksud, maka program pembangunan bidang kesehatan dan perekonomian perlu lebih ditingkatkan. Dengan keterbatasan penelitian ini, ke depan dapat dikembangkan lagi penelitian oleh penulis-penulis lain untuk mengkaji mengapa komponen (indeks) kesehatan dan pengeluaran menunjukkan pencapaian yang lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

#### 5. PERNYATAAN RESMI

Terima kasih kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah Manajemen Pembangunan Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah mendukung penulisan jurnal ini dan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang telah menyediakan data yang mudah diakses di *website* sehingga menjadi bahan yang sangat membantu penelitian ini.

#### 6. REFERENSI

- Angka Harapan Hidup (Tahun), 2009-2010. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/43/5/angka-harapan-hidup-penduduk.html>
- Angka Harapan Hidup (Tahun), 2011-2013. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/43/4/angka-harapan-hidup-penduduk.html>
- Angka Harapan Hidup (Tahun), 2014-2016. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/43/3/angka-harapan-hidup-penduduk.html>
- Angka Harapan Hidup (Tahun), 2017-2018. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/43/2/angka-harapan-hidup-penduduk.html>
- Angka Harapan Hidup (Tahun), 2020-2022. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/43/1/angka-harapan-hidup-penduduk.html>
- Ferawati, R. (2018). Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kontekstualita*, 33(02), 143–167. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.512>

- Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2010. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/242/5/harapan-lama-sekolah.html>
- Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2014-2016. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/242/3/harapan-lama-sekolah.html>
- Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2017-2019. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/242/2/harapan-lama-sekolah.html>
- Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2020-2022. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/242/1/harapan-lama-sekolah.html>
- Harapan Lama Sekolah (Tahun) 2011-2013. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/242/4/harapan-lama-sekolah.html>
- Ikbar, Y. (2014). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah* (2nd ed.). PT Refika Aditama.
- Indeks Pembangunan Manusia 2010-2010. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/35/5/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Indeks Pembangunan Manusia 2011-2013. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/35/4/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Indeks Pembangunan Manusia 2014-2016. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/35/3/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Indeks Pembangunan Manusia 2017-2019. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/35/2/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Indeks Pembangunan Manusia 2020-2022. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/35/1/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Iskandar, A., & Saragih, R. (2018). Analisis Kondisi Kesenjangan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan (Analysis of Economic Disparity Condition: Case Study From. *Jurnal Info Artha*, 37–52.
- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 202–216.
- Lewis, M. R. (2022). Cara Menghitung Persentase Pertumbuhan Tahunan. In *wikiHow*. <https://id.wikihow.com/Menghitung-Persentase-Pertumbuhan-Tahunan>
- Nugroho, A., Clarissa, A., & Utami, N. P. C. (2022). Indeks Pembangunan Manusia 2021 (W. Winardi & Y. Karyono (Eds.); 07300.2207). Badan Pusat Statistik.
- Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2010-2010. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/552/5/pengeluaran-per-kapita-disesuaikan-.html>
- Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2011-2013. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/552/4/pengeluaran-per-kapita-disesuaikan-.html>
- Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2014-2016. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/552/3/pengeluaran-per-kapita-disesuaikan-.html>
- Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2017-2019. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/552/2/pengeluaran-per-kapita-disesuaikan-.html>
- Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2020-2022. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/552/1/pengeluaran-per-kapita-disesuaikan-.html>
- Pratiwi, T. R., & Nurdiawansyah. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Periode 2013 - 2015. 10(2), 99–118.
- Purwoko. (2015). Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 1(2), 45–59.
- Rata-Rata Lama Sekolah (Metode Baru), Tahun 2009-2010. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/243/5/rata-rata-lama-sekolah-metode-baru-.html>
- Rata-Rata Lama Sekolah (Metode Baru) (Tahun), 2011-2013. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/243/4/rata-rata-lama-sekolah-metode-baru-.html>
- Rata-Rata Lama Sekolah (Metode Baru) (Tahun), 2014-2016. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/243/3/rata-rata-lama-sekolah-metode-baru-.html>
- Rata-Rata Lama Sekolah (Metode Baru) (Tahun), 2017-2019. (2022). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/243/2/rata-rata-lama-sekolah-metode-baru-.html>
- Rata-Rata Lama Sekolah (Metode Baru) (Tahun), 2020-2022. (2023). <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/243/1/rata-rata-lama-sekolah-metode-baru-.html>

rata-lama-sekolah-metode-baru-.html

- Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif (F. Maharani (Ed.); 5th ed.). PT Kanisius.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26.
- Sosiologi, M. (2017). Ketimpangan Dalam Pembangunan, Bunga Rampai Realitas Sosial Atas Ketimpangan Pembangunan di Indonesia (1st ed.). Media Nusa Creative.
- Sumirat, F. (2019). Analisis Inovasi Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengurangan Kesenjangan Wilayah. *Bappenas Working Papers*, 11(2), 270–293. <https://doi.org/10.47266/bwp.v2i2.45>
- Susanto, E. R., & Puspaningrum, A. S. (2020). Model Prioritas Program Pemerataan Ipm Di Provinsi Lampung Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process. *Jurnal Teknoinfo*, 14(1), 9. <https://doi.org/10.33365/jti.v14i1.543>
- Wahyuningsih, T., (2019). *Ekonomi Publik* (Monalisa (Ed.); 2nd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Unas, T. D. S. (2020). *Statistika Sosial Teori dan Aplikasi Untuk Mahasiswa dan Peneliti Ilmu-Ilmu Sosial* (L. P. Sinambela & E. E. Chotim (Eds.); 2nd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Wilsonoyudho, S. (2009). Kesenjangan dalam pembangunan kewilayahan. *Forum Geografi*, 23(2), 167–180.
- Yogi, Pradono, & Aritenang, A. (2018). *Pengantar Ekonomika Wilayah : Pendekatan Analisis Praktis* (F. Anugrah (Ed.); 1st ed.). Penerbit ITB.